

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	7
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP.....	7
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Strategi dan kebijakan	11
C. Program dan Kegiatan Pokok.....	13
D. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
E. Rencana Kinerja	17
F. Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	25
C. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
D. Analisis Atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Atas Pencapaian Kinerja.....	31
E. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV. PENUTUP.....	33

KATA PENGANTAR

Program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera untuk itu dalam rangka program yang diutamakan diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.

Untuk melaksanakan maksud tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, maka Kepala Dinas Perikanan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan.

Laporan ini merupakan sesuatu yang masih baru dilingkungan pemerintahan sehingga kesempurnaan dan keakuratannya masih jauh dari yang diharapkan. Saran dan kritik dari semua pihak mutlak diperlukan untuk menyempurnakan laporan ini pada masa yang akan datang.

Sekayu, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**H. ABDUL MUKOHIR, A.Pi.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640410 198903 1 008**

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bertanggung jawab merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

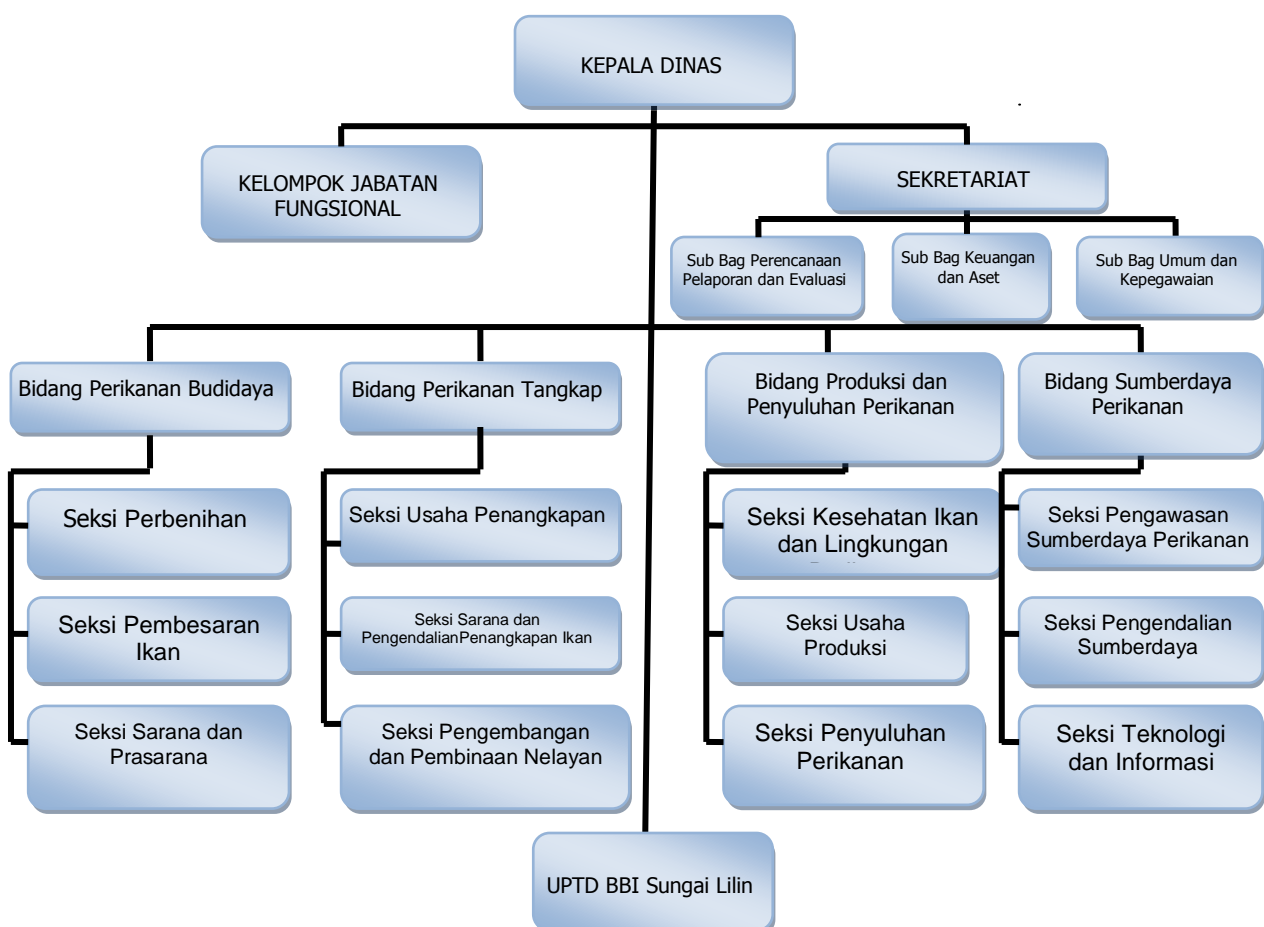
Penyusunan LkjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian target kinerja tahun 2017. Serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Dinas Perikanan mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah dibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, dan Sumberdaya Perikanan, sesuai dengan Kewenangan dan tugas lain yang dilimpahkan Bupati. Struktur Organisasi Dinas Perikanan lebih jelas dapat dilihat pada bagan seperti tertera pada Gambar 1.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang yang masing-masing mengepalai Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, dan Sumberdaya Perikanan. Disamping itu terdapat tiga Kasubbag dan dua belas Kepala Seksi, sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas di Kecamatan maka Kepala Dinas mengangkat seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk di BBI Sungai Lilin. Struktur organisasi Dinas Perikanan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 71 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembenihan
 2. Seksi Pembesaran Ikan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 1. Seksi Usaha Penangkapan
 2. Seksi Sarana dan Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan
- e. Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 2. Seksi Usaha Produksi
 3. Seksi Penyuluhan Perikanan
- f. Bidang Sumberdaya Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 2. Seksi Pengendalian Sumberdaya
 3. Seksi Teknologi dan Informasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Sungai Lilin,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 orang.

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

Golongan IV : 10 orang

Golongan III : 21 orang

Golongan II : 5 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

SLTA : 2 orang

DIV/S1 : 12 orang

S2 : 22 orang

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) serta Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perikanan atas pelaksanaannya, melaksanakan segala urusan dibidang perikanan, melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam

lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perikanan;
- f. Monitor dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2 Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang perikanan serta tugas pembantuan di bidang perikanan
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang perikanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang perikanan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas perikanan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas perikanan;
- g. Pengelolaan dibagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Keuangan dan BMD serta Umum dan Kepegawaian di lingkungan dinas perikanan;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perikanan;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- j. Pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan dinas perikanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas perikanan;

2.3 Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang budidaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktivitas di bidang budidaya;
- c. Penyusunan bahan penetapan sasaran perbenihan dan pembesaran ikan;
- d. Penyusunan bahan penerbitan sertifikasi pembenih dan pembudidaya;
- e. Pelaksanaan pembinaan pada Balai Benih Ikan, UPR, dan *Hatchery*; dan

f. Pelaporan pelaksanaan pengawasan terhadap pakan buatan dan alami di bidang budidaya;

2.4 Bidang Perikanan Tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, usaha penangkapan ikan, sarana penangkapan ikan, pengembangan dan pembinaan nelayan;.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam wilayah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyusunan program pengembangan usaha kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Penyusunan penetapan estimasi jumlah kebutuhan ikan dan sasaran penebaran benih ikan di perairan umum daratan;
- d. Penyusunan data rencana pengembangan pembinaan usaha nelayan kecil dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- e. Penyusunan dan pengembangan perikanan tangkap, pembinaan nelayan;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kegiatan lelang lebak lebung; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan di bidang penangkapan ikan;

2.5 Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan.

Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, kesehatan lingkungan, pengolahan hasil perikanan dan produksi perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyuluhan, produksi perikanan, kesehatan lingkungan dan pengolahan hasil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan produksi perikanan;
- c. Penyusunan bahan penetapan sasaran produksi perikanan dari hasil budidaya dan produk olahan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk dan pengembangan produksi serta peningkatan produktivitas;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan penyuluhan, kesehatan ikan, lingkungan dan pengolahan hasil;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan;
- g. Pelaporan pelaksanaan di bidang produksi dan penyuluhan perikanan;

2.6 Bidang Sumberdaya Perikanan.

Bidang Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumberdaya perikanan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan penetapan sasaran dibidang sumberdaya perikanan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan teknologi dan informasi di bidang sumberdaya pada masyarakat;
- d. Penyusunan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan dibidang sumberdaya;
- e. Penyusunan bahan perumusan tata operasional pengawasan, penegakan hukum, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada masyarakat sumberdaya perikanan;
- f. Penyusunan bahan inventarisasi, penyusunan rencana dan pengembangan;

2.7 UPTD Balai Benih Ikan Sungai Lilin.

UPTD Balai Benih Ikan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menghasilkan benih dan calon induk yang berkualitas;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan balai benih ikan;
- d. Melakukan pembinaan kepada UPR (Unit pembenihan rakyat) untuk mendapatkan benih unggul;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan produksi benih;
- f. Melakukan restocking ikan hasil pembenihan dan memberikan bantuan kepada pembudidaya;
- g. Melakukan pengembangan pembenihan untuk jenis ikan lokal;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Membantu pengawasan pemeliharaan dan Pembangunan sarana prasarana perikanan pada Balai Benih Ikan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

B. Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta kemudahan untuk dikelola.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Penyusunan Laporan

Kinerja Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Perikanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Oleh karenanya diharapkan secara terus menerus mendorong perbaikan proses manajemen dan kompetensi aparat dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Latar belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP, Serta Sistematika Penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Target Jangka Menengah, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran Rencana Strategis (RS)
- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2017–2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi – Misi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin :

Dinas Perikanan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengurus urusan pilihan dibidang perikanan, dan berperan aktif dalam pembangunan dibidang perikanan. Serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan perairan secara umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Dinas Perikanan merumuskan Visi Dinas Perikanan yaitu “**Masyarakat Perikanan Tangguh 2022**”

Fungsi pelayanan yang dilakukan Dinas perikanan dalam bentuk pelayananan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan melayani konsultasi masyarakat perikanan dalam rangka pembudidayaan, penangkapan, pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan lingkungan perikanan. Serta mewujudkan pengawasan dilingkungan perairan umum dengan memberdayakan masyarakat perikanan itu sendiri.

Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan yang *applicable*, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang berkualitas, memiliki keterampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin

tinggi. Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan semua pelaku pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dirumuskan 2 (dua) misi yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat perikanan dan pemberdayaan masyarakat perikanan guna terwujudnya produksi perikanan dengan profitabilitas tinggi.
- b. Mewujudkan tata kelola perikanan yang berkualitas, pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan serta fasilitasi sarana prasarana perikanan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas perikanan sebagai Perangkat Daerah yang mengurus urusan pilihan dibidang perikanan, dan berperan serta dan aktif dalam pembangunan dibidang perikanan. Serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan perairan secara umum. Dalam mewujudkan tujuan tersebut dinas perikanan merumuskan Tujuan Dinas Perikanan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perikanan tangkap, pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan ;
- b. Meningkatkan produksi budidaya dengan pemberdayaan dan pengembangan pembudidaya serta meningkatkan sarana prasarana perikanan budidaya;
- c. Meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan dan penerapan teknologi dan informasi perikanan;

B. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Masyarakat Perikanan Tangguh 2022		
Misi 1	Meningkatkan kemandirian masyarakat perikanan dan pemberdayaan masyarakat perikanan guna terwujudnya produksi perikanan dengan profitabilitas tinggi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan jumlah produksi perikanan dengan pemberdayaan dan pengembangan perikanan serta meningkatkan sarana prasarana perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Perikanan 2. Meningkatnya Pembudidaya Bersertifikasi 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan 4. Meningkatnya sarana dan prasarana yang ramah lingkungan 5. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Perikanan 2. Meningkatkan Pendampingan Masyarakat Perikanan 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia BBI 5. Menyediakan pakan alami yang berkelanjutan dan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 6. Pengembangan Kawasan budidaya air tawar dan air payau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Perikanan serta penambahan Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan yang ramah Lingkungan 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan pakan alami yang berkelanjutan, Penanganan Hama dan Penyakit Ikan dengan melakukan monitoring dan pembuatan laboratorium 5. Mengembangkan kawasan-kawasan potensial budidaya air tawar dan air payau
Misi 2	Mewujudkan tata kelola perikanan yang berkualitas, pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan serta fasilitasi sarana prasarana perikanan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Kelestarian	Tersedianya data keanekaragaman ikan,	1. Peningkatan Identifikasi	1. Penelitian dan Pengidentifikasian

Sumber Daya Perikanan	peningkatan produksi dan terjaganya kelestarian ikan, terjaganya ekosistem reservaat,	keanekaragaman ikan di lokasi suaka	keanekaragaman di lokasi suaka
2. Meningkatkan Pengelolaan Perairan Umum Daratan		2. Pembinaan pelaku <i>Illegal Fishing</i>	2. Peningkatan pembinaan <i>Illegal fishing</i>
3. Meningkatkan Teknologi Informasi Perikanan		3. Peningkatan Wawasan masyarakat tentang undang-undang perikanan	3. Pembinaan dan Sosialisasi Undang-undang Perikanan
		4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perairan Umum Daratan	4. Peningkatan Pembinaan Pokmaswas
		5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Perikanan	5. Pengembangan dan Pelatihan Kaji Terap Teknologi Perikanan
		6. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang perikanan	6. Sosialisasi dan pembinaan di kecamatan-kecamatan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Kebijakan Umum Urusan Perikanan Kabupaten Musi banyuasin 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
- b. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan.
- c. Meningkatkan lapangan kerja, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh.
- e. Mendorong Investor Sektor Perikanan

C. Program dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2012–2017, telah ditetapkan program yang akan dilaksanakan periode 2012-2017. Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi Pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan selama 2012-2017 adalah:

1. Kegiatan Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - b. Pengelolaan Pabrik Pakan Mini
 - c. Pendampingan Produksi Pabrik Pakan Mini
 - d. Pengelolaan BBI Sungai Lilin
 - e. Pengembangan BBI Sungai Lilin
 - f. Penumbuhan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
 - g. Identifikasi Monitoring Penyakit Ikan
 - h. Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Sungai Lilin
 - i. Pengadaan Paket pembenihan Ikan Hias Lokal
 - j. Rehab Kolam Budidaya Perikanan
 - k. Pengadaan Sarana Prasarana Pengembangan Mesin Pembuat pakan Ikan
 - l. DED Pembangunan BBUG (Balai Benih Udang Galah)
 - m. DED Pengembangan Kolam Percontohan
 - n. Pengembangan Kolam Percontohan
2. Kegiatan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
 - b. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau
 - c. Pengembangan Ikan Hias Lokal
 - d. Monitoring Perikanan Budidaya
 - e. Pengelolaan BBI Lokal sungai Lilin
 - f. Pengelolaan Hatchery
3. Kegiatan Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
 - b. Pengembangan PPI-PUD Sungai Lilin
 - c. Pengembangan Perikanan Tangkap
 - d. Monitoring Perikanan Tangkap
 - e. Studi Kelayakan Pembangunan PPI-PUD di Kec. Babat Toman

- f. Pembangunan Dermaga Sederhana
4. Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - a. Promosi Potensi / Promosi
 - b. Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
 - c. Pembinaan UMKM Pengelola Hasil Perikanan
 - d. Fasilitasi Pembangunan Rumah Kemasan
 - e. Penyusunan Profil Perikanan
 - f. Bimbingan Permodalan dan Manajemen Mutu Hasil
 - g. Pengadaan Sarana Prasarana P2HP
5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 - a. Peningkatan Pengawasan Suaka Perikanan Berbasis pemberdayaan Masyarakat
 - b. Restocking Ikan Perairan Umum
 - c. Rehabilitasi Suaka Perikanan
 - d. Pembinaan Pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat)
 - e. Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Perikanan
 - f. Peningkatan Wasdal pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
 - g. Lomba Pokmaswas
 - h. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
 - i. Pembangunan Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
 - j. Perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah perikanan
 - k. Pembangunan jalan usaha tani
 - l. Pengkajian potensi dan status sumberdaya ikan
 - m. Pengelolaan suaka perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat
 - n. Pengadaan pos pengawas
6. Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - b. Pengembangan minapadi
8. Kegiatan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
 - a. Penyusunan profil Dinas Perikanan
 - b. Pemeliharaan Website Dinas Perikanan
 - c. Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Perikanan
 - d. peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Perikanan
 - e. Penyediaan Sarana statistik Perikanan
9. Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan alat tulis kantor

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - l. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
9. Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Operasional
 - c. Pembangunan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - f. pengadaan Mebeleur
 - g. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
10. Kegiatan Program Peningkatan Disiplin aparatur
- a. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu
11. Kegiatan Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
12. Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 523/ /Disperik / 2012 tanggal 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

Indikator masing-masing sasaran dan target capaian indikator perencanaan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Perikanan Budidaya (ton) • Luas Areal Budidaya (ha) • Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Budidaya (kelompok) • Penghasilan Rumah Tangga Perikanan budidaya (Rp)
2.	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Perikanan Tangkap (ton) • Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Tangkap (Kelompok) • Penghasilan Rumah Tangga Perikanan Tangkap (Rp)
3.	Meningkatkan produksi benih ikan berbasis pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi benih BBI Lokal (Ekor) • Jumlah Unit Pembenihan Rakyat yang dibina (Kelompok) • Produksi Benih Unit Pembenihan Rakyat (Ekor) • Pelatihan yang dilakukan kepada Unit Pembenihan Rakyat (Kelompok)
4.	Meningkatkan mutu produk hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Rumah Tangga Pengolah Hasil Perikanan (Rp) • Cakupan Binaan Rumah Tangga Pengolah Hasil Perikanan (Kelompok) • Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton/Tahun) • Angka penjualan produk hasil perikanan (Rp)
5.	Peningkatan konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi ikan (kg/orang/tahun)
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan reservat yang dibersihkan (Ha) • Jumlah Ikan yang Direstoking di Perairan umum (ekor)
7.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Desa yang disosialisasi (desa) • Jumlah Pokmaswas (kelompok)

E. Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap Tahunnya. Rencana Kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran Strategis Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 7 sasaran dengan target indikator sebanyak 20 indikator.

F. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2011 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017 dan 2017-2022 maupun Renja Tahun 2017.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja**a. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, analisa pengukuran capain kinerja juga dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realiasi tahun 2017.
2. Membandingkan realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat tahun 2017 -2022
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian pernyataan kinerja.
7. Realisasi Anggaran

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

X	≥	85 %	:	Baik sekali
70 %	≤	X < 85 %	:	Baik
55 %	<	X < 70 %	:	Cukup
X	≤	55%	:	Kurang

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2017 Dinas Perikanan disusun berdasarkan capaian kinerja setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012-2017. Capaian kinerja tersebut berasal dari pengukuran kinerja yang merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pencapaian target IKU atas sasaran satu yaitu meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3. Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	18.964,74	19.003,27	100,2%
2	Luas areal budidaya	Ha	-	2600	-
3	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Kelompok	500	500	100%
4	Penghasilan Rumah Tangga perikanan Budidaya	(Rp)	-	431.307.975,44	-
Rata-rata capaian					

(*) = Harga ikan pada target di estimasikan sebesar Rp. 27.538

Pencapaian target IKU atas sasaran kedua yaitu meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4. Indikator Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	22.347,13	22.229,60	99,47%
2	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan tangkap	Kelompok	-	239	-
3	Penghasilan Rumah Tangga perikanan tangkap	(Rp)	633.795.464	624.882.492	98,59%
Rata-rata capaian					

Pencapaian target IKU atas sasaran ketiga yaitu meningkatkan produksi benih ikan berbasis pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5. Indikator Sasaran Meningkatkan Produksi Benih Ikan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Produksi benih BBI Lokal	Ekor	-	103.575	-
2	Jumlah Unit Pembenuhan Rakyat yang dibina	Kelompok	-	1	-
3	Produksi Benih Unit Pembenuhan Rakyat	Ekor	-	300.000	-
4	Pelatihan yang dilakukan kepada Unit Pembenuhan Rakyat	Kelompok	-	-	-
Rata-rata capaian					

Pencapaian target IKU atas sasaran keempat yaitu meningkatkan mutu produk hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan, dapat dilihat pada tabel 6 :

Tabel 6. Indikator sasaran meningkatkan mutu produk hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Penghasilan Rumah Tangga pengolah hasil perikanan	Rp	1.500.000	1.452.000	96,8%
2	Cakupan binaan Rumah Tangga pengolah hasil perikanan	Kelompok	70	70	100%
3	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan	Ton/tahun	203,89	203,89	100%
4	Angka penjualan produk hasil perikanan	Rp	26.505.700.000	26.505.700.000	100%
Rata-rata capaian					

Pencapaian target IKU atas sasaran kelima yaitu peningkatan konsumsi ikan, dapat dilihat pada tabel 7 :

Tabel 7. Indikator Sasaran Peningkatan Konsumsi Ikan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Konsumsi ikan	Kg/orang/tahun	45,32	34,32	75,7%
Rata-rata capaian					

Pencapaian target IKU atas sasaran keenam yaitu meningkatkan kualitas lingkungan perairan, dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8. Indikator Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perairan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Luasan Reservat yang dibersihkan	Ha	-	-	-
2	Jumlah Ikan yang direstocking di perairan umum	ekor	-	15.000	-
Rata-rata capaian					

Pencapaian target IKU atas sasaran ketujuh yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9. Indikator Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Jumlah Desa yang di sosialisasi	Desa	-	2	
2	Jumlah Pokmaswas	Kelompok	32	32	100%
Rata-rata capaian					

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Capaian Tahun 2017 Dengan Capaian Lima Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian %				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	13.240,69	16.900,57	17.543,76	18.592,88	19.003,27	107,18	114	97,00	98,53	100,2%
	Luas areal budidaya	Ha	1.739	1.742	1.781,73	2500	2600	96,66	88,06	81,91	111,11	-
	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Kelompok	200	350	400	450	500	-	-	-	112,50	100%
	Penghasilan Rumah Tangga Budidaya	(Rp)	149.948,66	192.343.878	426.863.839	422.503.678	431.307.975,44	-	-	-	81,30	-
2	Produksi Perikanan tangkap	Ton	19.344	20.117	20.922	21.696,24	22.229,60	96,14	96,16	96,14	99,70	99,47%
	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan tangkap	Kelompok	84	118	239	239	239	-	-	-	91,92	-
	Penghasilan Rumah Tangga perikanan tangkap	(Rp)	553.541,09	575.628,73	598.710.044	615.335.402	624.882.492	-	-	-	102,47	98,59%
3	Produksi benih BBI Lokal	Ekor			314.000	550.000	103.575	-	-	-	110,00	-
	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat yang dibina	Kelompok	1	1	1	1	1	100	100	100	100,00	-
	Produksi Benih Unit Pembenihan Rakyat	Ekor	20.000	100.000	138.000	300.000	300.000	-	-	-	150,00	-
	Pelatihan yang dilakukan kepada Unit Pembenihan Rakyat	Kelompok	1	1	1	0	0	100	100	100	0	-
4	Penghasilan Rumah Tangga pengolahan hasil perikanan	Rp	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.320.000	1.452.000	-	-		135,57	96,8%
	Cakupan binaan Rumah Tangga pengolahan hasil perikanan	Kelompok	70	70	70	70	70	35	26,92	23,33	100,00	100%
	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan	Ton/tahun	19,7	30,7	31,4	32,028	203,89	-	-	-	100,00	100%
	Angka penjualan produk hasil perikanan	Rp	2.561.130.000	4.000.360.000	4.082.000.000	4.387.836.000	26.505.700.000	-	-	-	0	-
5	Konsumsi ikan	Kg/orang/th	30,72	32,96	36,10	37,90	34,32	74,11	77,46	82,70	86,13	75,7%
6	Luasan Reservat yang dibersihkan	Ha	4,03	-	-	0	0	100,75	0	0	0	-
	Jumlah Ikan yang direstocking di perairan umum	ekor	283.500	260.000	0	0	15.000	81	65	0	0	-
7	Jumlah Desa yang di sosialisasi	Desa	15	0	0	0	2	75	0	0	0	-
	Jumlah Pokmaswas	Kelompok	9	29	0	0	32		0	0	0	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan target akhir Renstra tahun 2017 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Akhir Renstra 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022 (RPJMD)	Realisasi 2017	Capain 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	18.967,74	19.003,27	100,2%
	Luas areal budidaya	Ha	-	2600	-
	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Kelompok	500	500	100%
	Penghasilan Rumah Tangga Perikanan Budidaya	(Rp)	-	431.307.975,44	-
2	Produksi Perikanan tangkap	Ton	22.237,13	22.229,60	99,47%
	Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan tangkap	Kelompok	-	239	-
	Penghasilan Rumah Tangga perikanan tangkap	(Rp)	633.795.464	624.882.492	98,59%
3	Produksi benih BBI Lokal	Ekor	-	103.575	-
	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat yang dibina	Kelompok	-	1	-
	Produksi Benih Unit Pembenihan Rakyat	Ekor	-	300.000	-
	Pelatihan yang dilakukan kepada Unit Pembenihan Rakyat	Kelompok	-	-	-
4	Penghasilan Rumah Tangga pengolah hasil perikanan	Rp	1.500.000,-	1.452.000,-	96,8%
	Cakupan binaan Rumah Tangga pengolah hasil perikanan	Kelompok	70	70	100%
	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan	Ton/tahun	203,89	203,89	100%
	Angka penjualan produk hasil perikanan	Rp	26.505.700.000	26.505.7000.000	100%
5	Konsumsi ikan	Kg/orang/th	45,32	34,32	75,7%
6	Luasan Reservat yang dibersihkan	Ha	9	0	0%
	Jumlah Ikan yang direstocking di perairan umum	Ekor	500.000	15.000	3%
7	Jumlah Desa yang di sosialisasi	Desa	-	2	-
	Jumlah Pokmaswas	Kelompok	32	32	100%

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Rata-rata capaian **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya** pada tahun 2017 adalah 100,2 %. Di dukung oleh capaian indikator :

- a. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah 19.003,27 ton/tahun dengan capaian 100,2 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tapi tidak memenuhi target yang dibebankan. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 capaian target di tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, begitupun juga bila dibandingkan dengan empat tahun terakhir dari tahun 2012-2016. Hal ini disebabkan dalam rentang waktu empat tahun tersebut terdapat banyaknya bantuan hibah yang

diterima oleh kelompok tani yang mengakibatkan terjadinya industrialisasi perikanan dari hulu ke hilir mulai dari produksi hingga penghasilan petani perikanan. Sehingga capaian peningkatan produksi perikanan budidaya terlaksana secara maksimal. Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat kelompok tani perikanan maupun melalui materi seminar dan pertemuan, sehingga animo masyarakat dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dapat terlaksana secara maksimal.

- b. Luas areal budidaya pada tahun 2017 adalah 2.600 Ha ,Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Selanjutnya hal yang terjadi bila dibandingkan lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016, dimana capaian target selalu meningkat. Pada rentang waktu tahun 2012-2016 dimana terdapat banyak bantuan hibah yang diberikan kepada petani perikanan kurang dioptimalkan fokusnya pada perluasan areal budidaya. Para petani lebih menitik beratkan pada target produksi perikanan.
 - c. Cakupan bina rumah tangga perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah 500 kelompok dibandingkan dengan target sebesar 500 kelompok dengan capaian 100 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan target yang telah dibebankan.
 - d. Penghasilan rumah tangga perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah Rp. 624.882.492 dengan capaian 98,59 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dan maksimal tetapi belum mencapai target yang dibebankan. Hal ini berkat optimalisasi dari masyarakat perikanan yang mampu mengelola produksi perikanan dengan baik sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal tetapi tingginya persaingan harga dan kondisi lingkungan yang tidak stabil.
2. Rata-rata capaian **Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap** pada tahun 2017 adalah 99,47%. Di dukung oleh capaian faktor :
- a. Target Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2017 adalah 22.237,13 ton/tahun. kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tetapi realisasinya belum melebihi target yang dibebankan yaitu 22.229,60 ton/tahun. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 capaian target ditahun 2017 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sama halnya bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016. Hal ini disebabkan dalam rentang waktu empat tahun terakhir terdapat banyaknya bantuan hibah yang diterima oleh nelayan perikanan, sehingga memacu meningkatnya produksi perikanan tangkap.
 - b. Cakupan bina Rumah Tangga Perikanan Tangkap pada tahun 2017 adalah 239 kelompok. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, salah satu faktor kegagalan dalam adalah hampir sebagian besar masyarakat RTP tangkap merupakan nelayan

musiman dan sampingan, yang hanya melakoni profesinya ketika sedang berada di musim ikan berlimpah dan ketika waktu senggang disela mata pencaharian utama mereka.

- c. Penghasilan Rumah Tangga Perikanan tangkap pada tahun 2017 adalah Rp. 624.882.492 dengan capaian 98,59 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal dari target yang telah dibebankan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah keterkaitan dengan indikator cakupan RTP yang meningkat sehingga penghasilan RTP juga ikut meningkat.

3. Rata-rata capaian Meningkatkan Produksi Benih Ikan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2017 di dukung oleh capaian faktor :

- a. Produksi benih BBI Lokal pada tahun 2017 adalah 103.575 ekor dengan capaian .Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, beberapa kendala yang dihadapi dalam hal memproduksi benih di BBI Lokal telah mampu di minimalisir seperti kualitas air kolam pada BBI masih belum baik, sumber daya perikanan yang masih kurang. Alternatif solusi juga telah dilaksanakan dengan baik seperti dengan melakukan kegiatan pengelolaan kualitas air menjadi lebih baik dan optimal lagi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar proses kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi menurunnya jumlah benih dari tahun sebelumnya dikarenakan ada kegiatan rehab kolam induk, sehingga produksi tidak dapat maksimal.
- b. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang di bina pada tahun 2017 adalah 1 kelompok dengan capaian 100 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Serta sudah memenuhi target yang telah dibebankan. Perbandingan dengan tahun 2016 capaian target selalu terpenuhi, sama halnya bila dibandingkan dengan rentang waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2012-2016.
- c. Produksi benih Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pada tahun 2017 adalah 300.000 ekor. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Perbandingan dengan tahun 2016 capaian selalu terpenuhi bahkan cenderung signifikan.
- d. Pelatihan yang dilakukan kepada Unit Pembenihan rakyat pada tahun 2017 adalah 0 kelompok dengan capaian 0 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Sedikitnya jumlah kelompok yang dibebankan pada target dikarenakan masih sulitnya suatu kelompok Unit Pembenihan Rakyat untuk mendapatkan kelayakan dan rekomendasi, mengingat banyaknya berbagai kendala. Sehingga target yang dibebankan hanya 1 kelompok saja.

4. Rata-rata capaian **Meningkatkan Mutu Produk Hasil Perikanan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** pada tahun 2017 di dukung oleh capaian faktor :
- Penghasilan Rumah Tangga Perikanan (RTP) tahun 2017 adalah Rp.1.452.000 dengan capaian 96,8 %. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 sendiri capaian target selalu terpenuhi. Sama halnya bila dibandingkan dengan rentang waktu lima tahun terakhir tahun 2012-2016. Berlimpahnya hasil perikanan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi menjadi salah satu faktor meningkatnya keberhasilan capaian indikator ini. Masyarakat perikanan menjadi aktif dan bergairah karena hasil perikanan yang berlimpah, sehingga angka penghasilan Rumah Tangga Perikanan menjadi naik.
 - Cakupan binaan Rumah Tangga Pengolah Hasil Perikanan tahun 2017 adalah 70 kelompok dengan capaian 100,00 %. Untuk perbandingan dengan tahun 2015 capaian target selalu tidak tercapai. Pada rentang waktu empat tahun terakhir tahun 2012-2015 capaian target juga selalu tidak tercapai. Penurunan RTP hasil perikanan disebabkan oleh banyaknya temuan dilapangan kelompok RTP fiktif, sehingga setelah dilakukan rasionalisasi kelompok yang aktif hanya berjumlah 70 kelompok. Faktor lainnya yang menjadi kendala penurunan RTP hasil perikanan adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah sehingga realisasi yang dihasilkan kurang maksimal.
 - Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan tahun 2017 adalah 203,89 ton/tahun. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Faktor keberhasilan indikator ini antara lain melimpahnya jumlah ikan pada saat musim tertentu di sepanjang Daerah Aliran Sungai Musi (DAS) sehingga tingkat partisipasi masyarakat perikanan dalam meningkatkan produksi hasil pengolahan perikanan juga ikut meningkat.
5. Rata-rata capaian **Peningkatan Konsumsi Ikan** pada tahun 2017 adalah 34,32 kg/orang/tahun. dengan capaian 75,7%. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal tetapi belum mencapai target yang telah dibebankan. Untuk perbandingan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tetapi bila dibandingkan dengan lima tahun terakhir tahun 2012-2016 terjadi fluktuasi yang naik turun, kendala yang dihadapi dalam mencapai target peningkatan konsumsi ikan ini adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah sehingga optimalisasi kegiatan menjadi kurang maksimal.
6. Rata-rata capaian **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perairan** pada tahun 2017 adalah 0 dengan capaian 0 %. Hal ini disebabkan oleh defisitnya anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kab. Musi Banyuasin, sehingga tidak adanya program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja pada sasaran meningkatkan kualitas lingkungan perairan.

7. Rata-rata capaian **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan** pada tahun 2017 adalah 0 dengan capaian 0 %. Hal ini disebabkan oleh defisitnya anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kab. Musi Banyuasin, sehingga tidak adanya program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja pada sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

C. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis dan efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan terhadap setiap sasaran dapat dilihat pada tabel 12 :

Tabel 12. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap setiap sasaran

No	Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	98	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	406.800.000	397.967.400	2
			- Pengelolaan BBI Lokal Sungai Lilin	203.300.000	197.320.000	2,94
			- Pengelolaan Hatchery	47.750.000	46.064.900	3,53
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	99,47	- Kegiatan Monitoring perikanan budidaya	155.750.000	154.582.500
			Program pengembangan perikanan tangkap	400.000.000	398.551.630	0,83
			- Pengembangan PPI PUD Sungai Lilin	150.000.000	149.745.630	0,17
2	1.3 Meningkatkan Produksi Benih Ikan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	99	- Monitoring perikanan tangkap	150.000.000	149.925.000	0,5
			- Sosialisasi Perikanan dan Undang-undang Perikanan	100.000.000	98.842.000	0,16
			Program Pengembangan Perikanan Budidaya	1.523.950.000	1.502.057.900	1
			- Kegiatan Pengembangan Sarana dan prasarana BBI lokal sungai lilin	1.400.000.000	1.381.697.900	1,31
			- Pengelolaan Unit Perikanan	123.950.000	120.360.000	2,90
2	2.1. Meningkatkan mutu produk hasil perikanan	81,21	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	183.269.000	169.075.000	18,79
			- Kegiatan Pembinaan UMKM	109.512.000	108.487.000	0,94

			Pengelolaan Hasil Perikanan			
			- Pelatihan Poklachsar Hasil Perikanan	73.757.000	60.588.000	17,85
3	3.1.Peningkatan pemasaran produk hasil perikanan	98,66	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	100.000.000	98.661.000	1,44
			- Kegiatan pameran potensi / promosi	100.000.000	98.661.000	1,44
4	1.1. Peningkatan konsumsi ikan	90,82	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	132.495.000	120.335.000	9,18
			- Kegiatan sosialisasi gemarikan	132.495.000	120.335.000	9,18
5	1.1.Meningkatkan kualitas lingkungan perairan	0	Tidak ada program dan kegiatan yang menunjang sasaran ini			
	1.2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	0	Tidak ada program dan kegiatan yang menunjang sasaran ini			

1. Analisis mengenai sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar, dengan kegiatan monitoring perikanan budidaya dimana terdapat efisiensi sebesar 2 % pada kegiatan tersebut. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, 1 orang Kepala UPTD BBI , 1 Orang Kasubbag TU BBI, 6 orang tenaga kontrak dan 6 orang tenaga kontrak BBI dan 3 orang penyuluh perikanan bantu.

2. Analisis mengenai sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan pengembangan PPI PUD Sungai Lilin, dan monitoring perikanan tangkap, dimana terdapat efisiensi sebesar 0,53%. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 4 orang staf, 4 orang tenaga kontrak dan 3 orang penyuluh perikanan bantu.

3. Analisis mengenai sasaran meningkatkan produksi benih ikan berbasis pemberdayaan masyarakat serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar dengan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) lokal Sungai Lilin dan kegiatan pengembangan ikan hias lokal, dimana terdapat efisiensi sebesar 1 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 1

orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, 6 orang tenaga kontrak dan 6 orang tenaga kontrak BBI dan 3 orang penyuluh perikanan bantu.

4. Analisis mengenai sasaran meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan Kegiatan Pembinaan UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan, Pelatihan Poklhasar Hasil Perikanan, dimana terdapat efisiensi sebesar 18,79 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

5. Analisis mengenai sasaran peningkatan pemasaran produk hasil perikanan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan Pameran Potensi/Promosi, dimana terdapat efisiensi sebesar 1,14 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

6. Analisis mengenai sasaran peningkatan konsumsi ikan serta efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran ini ditunjang oleh satu program yaitu : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan sosialisasi gemarikan, dimana terdapat efisiensi sebesar 9,18 %. Adapun penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kasi, 3 orang staf, dan 5 orang tenaga kontrak.

7. Analisis mengenai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan perairan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Defisitnya anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kab. Musi Banyuasin, sehingga menyebabkan tidak adanya program dan kegiatan yang menunjang sasaran meningkatkan kualitas lingkungan perairan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

D. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan diatas antara lain di dukung oleh :

1. Semakin meningkatnya SDM Perikanan dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya baik melalui pendidikan dormal maupun non formal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

3. Kedudukan organisasi dan tugas pokok Dinas Perikanan yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perikanan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi antara lain yaitu :

1. Masih belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi dan antara organisasi dengan SKPD terkait.
2. Sistem informasi (basis data) yang dimiliki belum maksimal dan efektif
3. Pengawasan dan monitoring terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (*follow up*) yang masih lemah.

E. Realisasi Anggaran

Dasar penyusunan anggaran kegiatan Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut Belanja Daerah terbagi dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 13 :

Sasaran	Program	Realisasi	Persentasi Capaian
1	2	3	4
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Belanja Tidak Langsung:		
	1. Gaji dan Tunjangan	2.447.745.180,-	71,08%
	2. Tambahan Penghasilan PNS	1.025.062.500,-	72,39%
Terlaksananya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal	Belanja Langsung:		
	1. Belanja Pegawai	810.420.000,-	96,24%
	2. Belanja Barang dan Jasa	3.657.250.598,-	92,05%
	3. Belanja Modal	2.376.253.000,-	97,01%

Tabel 13. Akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kab. Musi Banyuasin

Secara umum Sasaran serta Program **Belanja Tidak Langsung** Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2017 terlaksana dengan baik dengan persentasi capaian untuk Gaji dan Tunjangan capaiannya 71,08% dan Tambahan Penghasilan PNS 73,39%, sedangkan Sasaran serta Program **Belanja Langsung** juga terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana Belanja Pegawai mempunyai realisasi capaian 96,24 % untuk Belanja Barang dan Jasa realisasinya 92,05 % Pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri. Untuk Belanja Modal dengan realiasinya 97,01%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin tergolong **Baik**. Keberhasilan program pembangunan bidang Perikanan sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik.

LKjIP yang telah disusun ini hendaknya mampu sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat publik khususnya Pejabat di lingkungan Dinas Perikanan, oleh karenanya LKjIP ini diharapkan secara terus menerus mendorong perbaikan proses manajemen dan kompetensi aparat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam pelaksanaannya seluruh Program/Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun Anggaran 2017 cukup berjalan mulus sebagaimana mestinya, memang ada beberapa hambatan tetapi lebih kepada ruang gerak dari Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Produksi dan Penyuluhan Perikanan, serta Bidang Sumberdaya Perikanan.

Diharapkan ke depan Dinas Perikanan mendapat perhatian khusus dari Pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dari Bappeda dan BPKAD kiranya dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas agar Visi dari Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan untuk mendukung tercapainya **Masyarakat Perikanan Tangguh 2022**.

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin,**

**H. Abdul Mukohir, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640410 198903 1 008**